

# OMBUDSMAN

## Perhutani KPH Lawu Ds Lakukan Siaran Langsung Bersama RRI Pro 2 FM Madiun

Riska Septia - [SURABAYA.OMBUDSMAN.CO.ID](http://SURABAYA.OMBUDSMAN.CO.ID)

Jan 5, 2022 - 18:54



[Madiun](#) – Perhutani Kesatuan Pemangkuan (KPH) Lawu Ds bekerjasama dengan Radio Republik Indonesia (RRI) Pro 2 FM Madiun melakukan siaran langsung membahas mengenai akhir tahun 2021 dan menghadapi new normal pengelolaan wisata tahun 2022 melalui siaran radio secara langsung dari Kantor KPH Lawu, Rabu (5/1/22).

[Adminstratur](#) KPH Lawu Ds, Loesy Triana yang didampingi Wakilnya Judiono

dalam siaran langsung tersebut menyatakan bahwa pengawalan wisata [Perhutani KPH Lawu Ds](#) di pengujung tahun 2021 sangat baik dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, QR Peduli lindungi disemua lokasi wisata, pembatasan pengunjung dan penjagaan keamanan.

Pihaknya juga selalu menggandeng dan melibatkan stakeholder dalam pengembangan wisata.

“Pintu terbuka lebar untuk penggiat wisata, investor yang berminat mengembangkan wisata melalui rebranding wisata maupun kerjasama bidang lain termasuk kerjasama tanaman agroforestry, silvofishery dan lain-lain sesuai potensi yang ada di wilayah Lawu,” tegasnya.

“Kami berharap pandemi segera berlalu dan seluruh kegiatan berjalan normal, wisata bangkit kembali dan berkembang untuk peningkatan kesejahteraan semua pihak,” tambah Loesy

Judiono yang juga selaku Wakil Administratur sebagai penanggung jawab Koordinator Keamanan (Korkam) yang diwawancarai langsung oleh reporter RRI Pro FM Madiun Sofyan, menambahkan bahwa wilayah kawasan hutan KPH Lawu Ds berada di 5 (lima) Kabupaten, yakni Kabupaten Ngawi, Magetan, Madiun, Ponorogo dan Pacitan yang luasnya 52.256,4 hektar, dan terbagi menjadi 9 (sembilan) Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) dan 30 wilayah Resort Pemangkuan Hutan (RPH) dan memiliki mitra kerja sebanyak 152 Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

Menurut Judiono pihaknya juga merangkul stakeholder dalam pengamanan wisata dan proses pengelolaan hutan lainnya di KPH Lawu Ds.

“Dalam mengatasi masalah gangguan keamanan hutan, keamanan pengunjung khususnya di lokasi wisata kita melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan setempat, disamping itu kita juga bersinergi dengan pihak TNI/Polri,” kata Judiono. @red (Kom-PHT/Lwuds/Eko)